

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, disesuaikan dengan Visi dan misi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin yaitu untuk ***“PRIMA DALAM PELAYANAN DAN TANGGUH DALAM PEREKONOMIAN YANG DIDUKUNG OLEH SDM BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, AGAMAIS, AMAN DAN SEJAHTERA”***

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Badung Th 2013-2018
13. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Th 2013-2018

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif
 3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
 4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
 5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM
KECAMATAN BANGKO BARAT KABUPATEN MERANGIN

A. VISI dan MISI

Visi Kecamatan Bangko Barat merupakan Kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut : ***“Prima Dalam Pelayanan Dan Tangguh Dalam Perekonomian Yang Didukung Oleh Sdm Berkualitas Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Agamais, Aman Dan Sejahtera”***

Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 6 (Enam) **MISI** yang harus dilaksanakan yaitu:

Misi Kecamatan Bangko Barat :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas
2. Meningkatkan Pelaksanaan Kehidupan Beragama, Sehingga Tercipta Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa dan Toleran
3. Meningkatkan Perekonomian Rakyat Dengan Berbasiskan Pertanian dan Perkebunan
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Aparatur Yang Profesional Sehingga Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa
6. Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Sehingga Tercipta Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan :
 - a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - c. Pembangunan Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
 - e. Peningkatan Peran Pemuda dan Olahraga Serta IPTEK
 - f. Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan dan Kependudukan
 - g. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
2. Meningkatkan pelaksanaan kehidupan masyarakat bergama
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan :
 - a. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Keagamaan

- b. Peningkatan Pendidikan Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan
 - c. Peningkatan Kerjasama Umat Beragama dan Antar Umat Beragama
 - d. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - e. Pengembangan Komoditas Unggulan di Kecamatan Ulu Rawas
 - f. Pengembangan Industri Pertanian dan Perkebunan
 - g. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Swasembada Berkelanjutan
 - h. Peningkatan Kemandirian dan Daya Beli Masyarakat
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan :

- a. Peningkatan Pengembangan SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Aparatur
 - c. Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur
 - d. Peningkatan Sosialisasi Program-Program Pembangunan
 - e. Peningkatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
4. Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Aparatur Yang Profesional Sehingga Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan :

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hasil Pembangunan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Program-Program Kegiatan Pembangunan
 - c. Pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri
 - d. Pengembangan Pariwisata, Budaya Lokal daerah
5. Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Sehingga Tercipta Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan :

- a. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
 - b. Penerapan Tata Pemerintahan dan Budaya Kerja Yang Baik
 - c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Aparatur dan Kemitraan
- Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas.

Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 th.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2

Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.
2. Pembinaan Pemerintah Kelurahan/Desa.
3. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
4. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat.
5. Penyusun Program dan pembinaan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

BAB IV

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bangko Barat Tahun 2013 - 2018. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, meliputi perubahan sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama.

Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin disajikan pada lampiran Tabel IV.1.

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.

Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Camat Bangko Barat

DARMIS, S.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 19631231 198507 1 004

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

Unit Organisasi : Kecamatan Bangko Barat

No	SASARAN RENTRAS (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENJELASAN (ALASAN)
I	PROG. PELAYANAN ADMINISIRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Jumlah surat terkirim dalam	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Perizinan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan lancar dalam	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
4	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya alat-alat listrik	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
7	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya Dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi

				perkantoran dengan lancar
9	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya tenaga kontrak yang membantu pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar
10	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan dalam Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	Tersedianya Koordinasi, konsultasi dan kunjungan ke dalam daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	Pembangunan rumah dinas	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya Rumah Dinas atau Sewa Rumah Dinas/Jabatan	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
2	Pembangunan gedung kantor	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Meningkat dan Bertambahnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
3	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana

				Aparatur
7	Pengadaan mebeleur	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya Mebeleur Kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
8	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Tersedianya alat-alat komunikasi kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Adanya Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Terpelihara dengan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Terpeliharaanya dengan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
13	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan	Meningkatnya disiplin aparatur
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS	Meningkatnya wawasan SDM PNS	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			

1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2	Penatausahaan dan penyusunan laporan aset SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya asset daerah	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN			
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem e-Planing	Tersusunnya Rencana kerja tahunan SKPD	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem e-Planing
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem e-Planing	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem e-Planing
VI I	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
1	Pelayanan dan operasional KTP dan kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP terhadap penduduk wajib KTP	Terpenuhinya Perekaman KTP-el	Rasio Penduduk ber KTP terhadap penduduk wajib KTP
VI II	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA			
1	Pembinaan komunitas adat terpencil (KAT)	Persentase Penduduk Miskin	Terbinanya Lembaga Adat Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang nilai-	Persentase Pengembangan

	bangsa		nilai luhur budaya bangsa	Wawasan Kebangsaan
2	Penyuluhan dan koordinasi Kerukunan dalam kehidupan beragama	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Adanya Penyuluhan dan Koordinasi Kerukunan dalam kehidupan beragama	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Dapat mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Merangin Tahun 2016	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan
X	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1	Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2016	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Penatausahaan dan Pemanfaatan aset pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2016	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Adanya Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah
XI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN			
1	Pembinaan program PKK	Meningkatnya keaktifan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dalam upaya mencapai kesetaraan di tingkat kecamatan	Adanya Pembinaan PKK Kecamatan	Meningkatnya keaktifan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dalam upaya mencapai kesetaraan di tingkat kecamatan
XI I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA			
1	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Adanya Pembinaan Atlit Berprestasi sejak usia dini	Meningkatnya kemampuan Pemuda dibidang olah raga	Adanya Pembinaan Atlit Berprestasi sejak usia dini

XI II	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen usulan rencana hasil musrenbang RKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
XI V	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU			
1	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Pemkab Merangin	Terlaksananya Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Pemkab Merangin